

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN AUTENTIK PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Dede Kusnadi¹, Nanang Fattah², Adian Husaini³, Ruhenda³

¹Kemenag Kabupaten Karawang

²Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

³Universitas Ibn Khaldun, Bogor

dedekusnadi01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui efektivitas implementasi kebijakan penilaian autentik, 2) menganalisis implementasi penilaian autentik pada pembelajaran PAI, 3) menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas implementasi kebijakan penilaian autentik dan 4) menjelaskan dampak implementasi kebijakan penilaian autentik terhadap kinerja guru. Penelitian ini menggunakan teori model George C. Edward III yang mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan melalui komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut sangat bermakna bagi implementasi kebijakan di sekolah. Sebab, implementasi kebijakan merupakan kunci sukses sebuah perintah, jika gagal dalam melaksanakan suatu kebijakan berarti kegagalan dalam mencapai tujuan. Sedangkan pelaksanaan implementasi penilaian autentik pembelajaran PAI harus mengacu kepada Permendikbud Nomor: 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang menilai peserta didik meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis deskriptif dengan model studi kasus. subjek penelitiannya adalah Guru PAI. Data diperoleh melalui data primer dengan cara observasi langsung dan wawancara, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian dan temuan di lapangan adalah sebagai berikut ; 1) implementasi kebijakan penilaian autentik sudah terlaksana dengan baik dan efektif, 2) implementasi penilaian autentik pada pembelajaran PAI sudah terlaksana dengan baik. Namun masih ditemukan pola pikir (*mindset*) guru yang belum berubah dalam mengimplementasikan penilaian autentik secara komprehensif. Artinya, guru melakukan penilaian dengan format seadanya, hanya mengukur hasil akhir peserta didik dan 3) Dukungan implementasi kebijakan penilaian autentik meliputi kepala sekolah, guru yang berkompeten, aktivitas peserta didik, sosialisasi kebijakan implementasi, fasilitas dan sumber belajar yang memadai, peran pemerintah daerah, dan peran pengawas. Sedangkan yang menghambat di antaranya melalui sumber daya manusia, sarana dan prasarana, instrumen penilaian, dan lingkungan akademik. Selanjutnya, implementasi kebijakan penilaian autentik berdampak terhadap kesiapan guru dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil belajar peserta didik.

Kata Kunci: Efektivitas; Implementasi Kebijakan; Penilaian Autentik; PAI.

I. PENDAHULUAN

Problem peningkatan mutu pendidikan merupakan persoalan bangsa, hingga saat ini menjadi persoalan utama yang harus dicarikan solusinya. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan harus mendapatkan dukungan dan perhatian dari semua pihak yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, diharapkan muncul berbagai teori, gagasan dan pendekatan yang dapat mempengaruhi kebijakan.

Mulyasa mengatakan bahwa pendidikan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam mengemukakan pesan-pesan kontribusi serta sarana dalam membangun watak bangsa (*national character building*) (Mulyasa and Mukhlis, 2007). Dalam upaya meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia, diperlukan pendidikan yang berkualitas. Karena sesungguhnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Dalam hal ini, bagaimana pemerintah merancang kebijakan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Dunn dalam Nugroho mengatakan bahwa problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah masalah publik mengenai nilai, kebutuhan atau peluang yang tidak dapat diwujudkan. Walaupun problem tersebut tidak dapat ditemukan, tapi hanya mungkin diraih melalui aktivitas publik yaitu melalui kebijakan publik. Karakteristik problem masalah publik yang harus di selesaikan selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga penyelesaian masalahnya membutuhkan pendekatan holistik (*holistic approach*) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak bisa dipisahkan atau diukur secara terpisah dari faktor lainnya (Nugroho, 2011).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu pendidikan dibutuhkan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 3 ditegaskan bahwa sesungguhnya pendidikan yang bermutu menjadi tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Melihat kenyataan tersebut, pemerintah tidak pernah berhenti dan terus berusaha meningkatkan dan memperbaiki mutu pendidikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya serta menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional dengan merancang berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah implementasi kebijakan Kurikulum 2013 di setiap jenjang pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.

Menyadari pentingnya peningkatan mutu pendidikan, maka pemerintah bersama *stakeholder* terus berusaha merealisasikan amanat tersebut, dengan cara

mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Misalnya melakukan perubahan dan perbaikan kurikulum, model penilaian, menyediakan sarana belajar, mengembangkan model pembelajaran dan penyediaan bahan ajar, serta meningkatkan guru yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan dengan mengeluarkan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan di lapangan. Implementasi kebijakan tersebut merupakan tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau program yang sudah dirancang harus diimplementasikan, agar memiliki dampak yang diharapkan.

Adanya kebijakan implementasi Kurikulum 2013 yang digagas oleh pemerintah dan diberlakukan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Hal ini berpengaruh terhadap model kegiatan belajar dan model penilaian yang selama ini digunakan. Model pembelajaran dalam Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) yaitu dengan mengamati, menanya, menggali, menghubungkan dan mengkomunikasikan, sedangkan model penilaiannya menggunakan model penilaian autentik (*assessment authentic*). Penilaian autentik memiliki kajian yang sesuai dengan pendekatan ilmiah, karena untuk memperoleh gambaran dan menggali informasi mengenai kemampuan hasil belajar peserta didik meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini, guru sebagai aktor Kurikulum 2013 di kelas, diharapkan mampu merencanakan proses pembelajaran dengan mengembangkan model-model pembelajaran dan mampu melaksanakan penilaian yang efektif, sehingga dapat meningkatkan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan Permendikbud No. 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pasal 4, dinyatakan bahwa "Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020". Dengan demikian, ketentuan ini memberi kesempatan kepada sekolah yang belum siap menerapkan Kurikulum 2013 dengan tetap melaksanakan Kurikulum 2006 sambil mengadakan persiapan-persiapan yang dipandang perlu, sehingga selambat-lambatnya pada tahun 2020 diharapkan seluruh sekolah, sudah menerapkan Kurikulum 2013. Sebagai langkah awal, yang harus dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi para guru dan tenaga kependidikan, baik di sekolah maupun mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan serupa yang dilaksanakan oleh instansi lain (LPMP atau Kemenag) serta unsur-unsur lain yang terlibat langsung dalam proses pendidikan.

Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 dapat dilihat dari keadaan indikator Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada pribadi peserta didik secara *holistik* (utuh). Kata **utuh** perlu penekanan, sebab hasil pendidikan sebagai *output* dari setiap pendidikan belum mempresentasikan keutuhan tersebut. Dengan kata lain, bahwa kelulusan dari

setiap jenjang pendidikan tersebut baru menghasilkan SKL pada luarannya saja. Kondisi ini boleh jadi, dikarenakan alat ukur atau penilaian hasil belajar peserta didik yang ada selama ini belum menyentuh seluruh kemampuan aspek penilaian, sehingga hasil penilaian tersebut belum mencerminkan potensi yang sesungguhnya. Terlebih dalam penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih dikatakan gagal.

Menurut Mochtar Buchori dalam Muhaimin yang mengatakan kegagalan itu terjadi karena dalam praktiknya pembelajaran Pendidikan Agama Islam hanya mengacu pada aspek pengetahuan semata dari pemahaman kesadaran nilai-nilai agama dan mengesampingkan bimbingan pada aspek sikap juga *konatif-voletif*, yakni keinginan dan kemauan dalam mempraktikkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara teori dan praktik (*gnosis* dan *praxis*) dalam hidup beragama (Muhaimin, 2009). Dalam praktiknya, pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat beralih menjadi pengajaran agama, akhirnya tidak membentuk pribadi-pribadi peserta didik yang ber-*akhlakul karimah*, padahal inti dari Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan nilai-nilai agama.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka lahirlah istilah asesmen (*assessment*). *Assessment* diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan data, melaporkan, dan menggunakannya sebagai prestasi belajar peserta didik. Martinis Yamin mengungkapkan bahwa penilaian proses pembelajaran yaitu menilai kegiatan pembelajaran sejak awal sampai akhir pembelajaran, melalui tugas-tugas yang disampaikan kepada peserta didik, menilai bakat peserta didik dan mengevaluasi keberhasilan peserta didik, mengevaluasi kegiatan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ujian naik kelas (Yamin, 2007).

Dengan demikian, keadaan penilaian autentik dalam Kurikulum 2013 harus mengacu kepada Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian, yaitu: a) Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas, b) Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai dan c) Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai.

Dari hasil pengamatan di lapangan, ditemukan beberapa permasalahan sehubungan dengan implementasi kebijakan penilaian autentik, di antaranya masih terdapat kendala saat menerapkan kebijakan penilaian autentik dalam Kurikulum 2013, belum meratanya kemampuan guru terhadap format instrumen penilaian autentik terutama penilaian sikap, karena selain harus mengisi dalam bentuk angka, juga melibatkan guru lain, belum meratanya sosialisasi implementasi kebijakan penilaian autentik, adanya kebijakan yang berubah-ubah seiring dengan adanya kurikulum yang berbeda di setiap jenjang pendidikan, sehingga bisa berdampak terhadap efektivitas implementasi kebijakan di

lapangan, sulitnya mengubah *mindset* guru dari *teacher centered* ke *student centered*, sehingga guru lebih menguasai materi dan penilaian lebih fokus pada aspek pengetahuan semata, sementara aspek lainnya masih terabaikan.

Atas dasar hal itu, maka fokus pada penelitian ini mengenai: 1) Efektivitas implementasi kebijakan penilaian autentik berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan diukur melalui aplikasi model kebijakan Edward III, 2) Prosedur implementasi kebijakan penilaian autentik diukur dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil, 3) Faktor pendukung dan penghambat diukur dengan ketersediaan sumber daya yang memadai dan 4) Dampak kebijakan penilaian autentik diukur dengan kinerja guru.

II. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Karawang. Metode yang digunakan pada penelitian adalah metode penelitian kebijakan. Metode ini digunakan untuk mengkaji setiap persoalan yang diteliti, yaitu menganalisis kebijakan implementasi penilaian autentik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Karawang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kasus. Menurut Nasution bahwa penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka tentang dunia sekitar (Nasution, 2003). Sedangkan, Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong menyatakan, bahwa metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang bisa diamati (Moleong, 2007). Sedangkan, Sukmadinata mengatakan bahwa penelitian dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau hasil rekayasa manusia (Sukmadinata, 2005).

Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaku utama, baik dari para pengambil, pelaksana dan penerima kebijakan meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan, sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dari informan yaitu: Pengawas, Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, Tata Usaha, Guru PAI. Sedangkan data sekunder ini dihasilkan melalui berbagai sumber seperti: buku kepustakaan, dokumen, arsip atau sumber lain yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, hasil data dianalisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penilaian Autentik pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Yang akan dianalisis dalam penelitian ini mengenai sosialisasi implementasi kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Kurikulum 2013, dengan tujuan apakah implementasi penilaian autentik memiliki kesesuaian dengan teori implementasi yang diungkapkan oleh Edward III, untuk mencapai implementasi kebijakan publik yang baik dan efektif.

1. Komunikasi

Komunikasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat, apakah kebijakan penilaian autentik pada pembelajaran PAI di SMK Negeri 2 Karawang dapat dijalankan dengan efektif. Komunikasi ini dilakukan oleh para instruktur untuk mensosialisasikan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan kepada guru-guru dan guru PAI.

Edward III menyebutkan ada 3 faktor keberhasilan kebijakan, yaitu; (1) transformasi yang tepat akan melahirkan implementasi yang baik, (2) adanya kejelasan yang ditangkap oleh kelompok sasaran sehingga tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan kebijakan dan (3) adanya konsistensi saat penyampaian kebijakan di lapangan.

a. Transformasi

Transformasi dalam penelitian ini, yaitu terlaksananya implementasi kebijakan penilaian autentik yang dilaksanakan Kemendikbud melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang telah melatih instruktur Tingkat Provinsi dan Instruktur Kabupaten.

Para instruktur tersebut, bertugas untuk menyampaikan kembali tentang kebijakan penilaian autentik pada pembelajaran PAI, baik melalui diklat, *workshop*, diskusi maupun IHT. Maksud dari kegiatan tersebut, diharapkan agar guru di SMK Negeri 2 Karawang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perubahan sistem penilaian Kurikulum 2013, yaitu penilaian autentik.

Untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi kebijakan penilaian autentik di SMK Negeri Karawang, peneliti mengadakan wawancara dengan para informan yang didukung oleh data, dapat ditegaskan bahwa pemberian informasi kebijakan penilaian autentik dilaksanakan dengan cara sosialisasi. Adapun penyelesaian atau cara yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yaitu dengan mengikutsertakan guru-guru pada kegiatan-kegiatan diklat, *workshop*, pendampingan teknis dan dialog, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten, Pengawas atau MGMP.

Untuk mengukur keberhasilan transformasi efektivitas implementasi kebijakan penilaian autentik pada pembelajaran agama Islam di SMK Negeri 2 Karawang. Apakah

implementasi kebijakan penilaian autentik terlaksana dengan baik atau tidak? Salah satunya penulis mengamati melalui kehadiran guru PAI di kelas selama 1 tahun pelajaran 2017/2018 yang terbagi dalam 2 (*dua*) semester. Semester I (*satu*) Sejak bulan Juli – Desember 2017, sedangkan semester II (*dua*) dilaksanakan dari bulan Januari – Juni 2018.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada semester I (Juli – Desember 2017) diperoleh angka rata-rata kehadiran guru PAI sebesar 99.76% termasuk kategori sangat baik. Sebagaimana terlihat pada kategori penskoran berada di antara interval 81 – 100. Artinya bahwa tingkat kehadiran guru PAI saat melaksanakan penilaian autentik pada pembelajaran PAI di SMK Negeri Karawang sudah berjalan secara efektif.

Selanjutnya, pengolahan data pada semester II (Januari – Juni 2018) diperoleh angka rata-rata kehadiran sebesar 99.22% termasuk kategori sangat baik. Sebagaimana terlihat pada kriteria interpretasi skor berada di antara interval 81 – 100. Artinya bahwa tingkat kehadiran guru PAI saat melaksanakan penilaian autentik pada pembelajaran PAI di SMK Negeri Karawang sudah berjalan secara efektif.

Selanjutnya hasil wawancara, maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan penilaian autentik di SMK Negeri 2 Karawang sudah dilaksanakan dan terlaksana dengan baik. Di samping hal tersebut, bisa dilihat juga dari keikutsertaan guru-guru mengikuti berbagai kegiatan diklat, *workshop*, pendampingan teknis dan diskusi yang dilaksanakan MGMP dan Kemenag maupun Instansi lain termasuk pelaksanaan *In House Training* oleh pihak sekolah, dengan maksud memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada guru sebelum memasuki tahun ajaran dimulai. Sedangkan dilihat dari tanggung jawab guru dalam mentransformasikan implementasi penilaian autentik terhadap peserta didik di kelas telah dijalankan dengan baik, disebabkan karena tingkat kehadiran guru menunjukkan kategori sangat baik.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diperoleh para pelaksana kebijakan atau pihak yang terkait implementasi program harus jelas dan tidak membingungkan. Dengan kejelasan informasi maka akan memudahkan pihak mana pun dan mengurangi kesalahpahaman yang mengakibatkan terhadap keberhasilan program tersebut.

Agar informasi diperoleh secara jelas dan dimengerti, maka strategi penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu ; 1) penyampaian informasi langsung dan 2) penyampaian informasi secara tidak langsung melalui media elektronik atau media cetak.

Penyampaian informasi langsung melalui kegiatan Bimbingan Teknis yaitu kegiatan On dan In langsung ke sekolah atau kelas dengan melakukan pendampingan teknis dan diakhiri dengan kegiatan refleksi. Tujuan dari kegiatan tersebut, agar penyampaian informasi ini bisa diperoleh dan dirasakan secara langsung, jelas dan benar-benar bisa

dipahami serta dikuasai dengan baik oleh guru sasaran. Gambar berikut merupakan kegiatan pendampingan bagi guru-guru PAI.

Selanjutnya, untuk memperoleh kejelasan informasi, tentang efektivitas pelaksanaan penilaian autentik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam ini, agar dapat dilaksanakan secara efektif dan baik, maka peneliti mengamati melalui kehadiran di kelas.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti menggunakan lembar observasi selama 2 pekan dari tanggal 7 – 20 Agustus 2017 untuk semua guru PAI yang berjumlah 4 orang. Kegiatan pengamatan dilakukan dengan melihat ; a) tingkat keterlambatan masuk kelas dan b) saat keluar kelas.

Peneliti juga melakukan pengolahan data, dari hasil pengamatan melalui lembaran observasi mengenai kehadiran guru di kelas. Berdasarkan rekap dari kegiatan di kelas pada proses pembelajaran PAI, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Rekap Waktu Masuk Kelas

Waktu Keterlambatan	Kurang dari 10 Menit	10 Menit s/d 15 Menit	Lebih dari 15 Menit
Jumlah guru	3	1	0
Persentase (%)	75%	25%	0%

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, bahwa keterlambatan Guru PAI pada kehadiran di kelas menunjukkan kurang dari 10 menit terdiri dari 3 orang guru, sehingga diperoleh angka rata-rata sebesar 75%, kemudian 10 Menit s/d 15 Menit terdiri dari 1 orang, sehingga diperoleh angka rata-rata sebesar 25%, selanjutnya lebih dari 15 menit tidak ada yang terlambat, sehingga angka rata-ratanya sebesar 0%. Artinya bahwa kehadiran guru di kelas menunjukkan kedisiplinan yang baik.

Tabel 2. Rekap Saat Meninggalkan Kelas

Saat Meninggalkan Kelas	= Jadwal	< 10 Menit s.d 15 Menit dari Jadwal	< dari 15 Menit lebih dari Jadwal
Jumlah Guru PAI	3	1	0
Persentase (%)	75%	25%	0%

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, bahwa guru PAI pada saat meninggalkan kelas sebelum pembelajaran selesai menunjukkan bahwa sesuai/sama dengan jadwal belajar sebanyak 3 orang guru, sehingga diperoleh angka rata-rata sebesar 75%, kemudian < 10 menit s/d 15 menit hanya 1 orang, sehingga diperoleh angka rata-rata sebesar 25%, selanjutnya lebih dari < 15 menit tidak ada guru yang meninggalkan kelas sebelum pembelajaran selesai atau berakhir. Artinya guru sangat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan penilaian autentik sudah dilaksanakan secara efektif oleh guru. Karena guru, telah memperoleh informasi secara jelas dan langsung dari para instruktur yang sudah mendapat pelatihan, melalui kegiatan bimtek, pendampingan teknis, kegiatan On dan In, diskusi dan IHT. Sebaliknya, penyampaian informasi tidak akan terlaksana secara efektif, apabila dilaksanakan secara tidak langsung melalui media elektronik atau media cetak. Sedangkan dilihat dari pelaksanaan penilaian autentik di kelas, yang dilaksanakan oleh guru sudah dijalankan dan terlaksana dengan baik. Dikarenakan tingkat kehadiran guru di kelas menunjukkan katagori sangat baik dan guru telah menunjukkan rasa tanggung jawab penuh terhadap kegiatan belajar dengan tidak meninggalkan atau keluar kelas sebelum waktunya.

c. Konsistensi

Konsistensi (*consistency*) merupakan kunci kesuksesan dan keberhasilan. Konsisten adalah aktivitas yang dilaksanakan secara kontinu guna mencapai tujuan. Konsistensi meliputi konsistensi komunikasi kebijakan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan. Pada prinsipnya, komunikasi kebijakan dapat diselenggarakan ketika kebijakan tersebut telah disahkan.

Adapun yang menjadi kebijakan pada penelitian ini, yaitu sosialisasi kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Permendikbud No. 3 tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan kepada para guru termasuk guru PAI.

Selanjutnya hasil wawancara di lapangan, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan Kurikulum 2013 tetap digunakan sebagai panduan untuk lancarnya kegiatan pembelajaran. Kemudian seiring diberlakukannya Kurikulum 2013, maka dalam mengimplementasikan kebijakan penilaian autentik tersebut, diperlukan konsistensi secara kontinu dari pelaksana yaitu guru PAI, sehingga implementasi kebijakan penilaian autentik bisa terlaksana secara efektif.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian melalui ke 3 (tiga) indikator komunikasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang terjadi dalam penyampaian informasi kebijakan penilaian autentik telah terlaksana secara efektif. Hal ini karena indikator yang ada pada komunikasi seperti transformasi, kejelasan dan konsisten sudah dijalankan dan terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, Kepala Sekolah sebagai manajer dari pelaksana kebijakan telah mengkomunikasikan kebijakan kepada guru PAI dengan jelas dan dilakukan penuh tanggung jawab sesuai fungsinya.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan Sumber Daya Manusia yang bermutu, memiliki keterampilan, kecakapan dan kemampuan. Edward III dalam Nugroho mengatakan bahwa sumber daya

di sini meliputi sumber daya manusia (*staff*) dan non manusia (fasilitas atau sarana prasarana) (Nugroho, 2011).

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Edward III dalam Winarno menjelaskan bahwa sumber-sumber menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi penilaian autentik adalah sebagai berikut: 1) Sumber daya manusia berupa guru sebagai tenaga pengajar yang berkompentensi, 2) Sumber daya waktu berupa sosialisasi tentang penilaian autentik dan 3) Sumber daya finansial berupa dana yang harus disiapkan dalam menunjang terlaksananya proses penerapan penilaian autentik (Winarno, 2007).

Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan meraih hasil yang baik, apabila didukung oleh SDM yang bermutu, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas SDM berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan memiliki kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan banyaknya SDM apakah sudah terpenuhi atau belum. Untuk itu, penerapan penilaian autentik sangat memerlukan SDM berkualitas, memadai dan mampu menguasai dibidangnya saat menerapkan kebijakan tersebut.

Adapun sumber daya yang ada di SMK Negeri 2 Karawang berdasarkan status dan kualifikasi akademik, maka dapat diketahui bahwa jumlah guru sebanyak 59 orang, terdiri dari PNS 44 orang (74,58%) dan Tenaga Honor 15 orang (25,42%). Sementara dari kualifikasi pendidikan menunjukkan lulusan D.3 sebanyak 3 orang, lulusan S.1 sebanyak 49 orang dan lulusan S.2 sebanyak 7 orang, artinya sumber daya guru yang ada di SMK Negeri 2 Karawang secara kuantitas sudah cukup memadai dan terpenuhi. Sedangkan jumlah guru PAI sebanyak 4 (*empat*) orang dengan kualifikasi pendidikan lulusan S.2 jumlah 1 orang dan kualifikasi pendidikan lulusan S.1 jumlah 3 orang. Dengan kata lain, bahwa keadaan guru PAI baik menyangkut jumlah dan kualitas telah cukup dan memadai.

Adapun sumber daya manusia yang menjadi implementor dalam sosialisasi kebijakan penilaian autentik di SMK Negeri 2 Karawang, yaitu: Pengawas, Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum dan Guru yang sudah mendapatkan pelatihan (Instruktur Kurikulum).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan dapat terselenggara secara efektif, jika ada dukungan SDM yang mumpuni dan berkualitas. Dalam kaitan ini, guru sebagai pelaksana kebijakan penilaian autentik, harus benar-benar menguasai cara dan teknik penilaian dan mampu mengembangkan format penilaian di kelas. Oleh karena itu, guru hendaknya memiliki keahlian sesuai dengan fungsi dan tugasnya, sehingga apa yang diharapkan dapat menghasilkan luaran yang berkualitas. Walaupun dalam pelaksanaannya terkadang terkendala oleh aturan yang

berubah-rubah, banyaknya rubrik atau format penilaian dan sulitnya mengubah kebiasaan mengajar guru selama ini dari kegiatan yang sifatnya klasik menjadi kegiatan belajar yang inspiratif.

b. Sumber Daya Non Manusia (fasilitas atau sarana prasarana)

Sumber daya non manusia meliputi dana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasana. Menurut Edward III dalam Agustino bahwa Sumber Daya Non Manusia merupakan bagian penting dalam melaksanakan kebijakan (Agustino, 2008).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, dapat peneliti simpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, baik menyangkut pengembangan fisik (bangunan) ataupun sarana yang lainnya, misalnya buku siswa dan buku guru, format penilaian dan alat praktik yang sangat dibutuhkan saat kegiatan pembelajaran, guna meningkatkan pendidikan yang bermutu, sehingga keefektifan pelaksanaan penilaian dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga dibuktikan peneliti, berdasarkan hasil pengamatan bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan untuk menunjang terlaksananya kebijakan penilaian autentik.

3. Disposisi

Edward III dalam Winarno bahwa kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi mendasar terhadap penerapan kebijakan secara efektif (Winarno, 2007).

Kecenderungan sikap dari pelaku kebijakan memiliki peran yang strategis guna merealisasikan aturan yang diharapkan sesuai tujuan. Oleh karena itu, karakter menjadi hal penting yang dimiliki pelaku kebijakan. Contoh memiliki integritas, amanah, tanggung jawab dan konsisten. Integritas memiliki konsistensi sesuai dengan harapan. Amanah menunjukkan adanya kepercayaan terhadap pelaku saat menjalankan program sesuai aturan. Tanggung jawab yaitu memiliki semangat untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya, sedangkan komitmen dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Sikap dari para pelaku kebijakan berdampak terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Jika pelaksana memiliki perilaku yang positif, diharapkan akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan penyusun kebijakan. Sedangkan, jika perilakunya menunjukkan kurang responsif, dapat dipastikan bahwa pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak akan sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa sumber di lapangan, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan penilaian autentik pada pembelajaran PAI sudah terlaksana secara efektif. Hal ini disebabkan, karena adanya dukungan dari semua pihak yaitu Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, Guru PAI atau Guru lainnya yang mengatakan siap menjalankan dan melaksanakan penilaian sesuai Kurikulum 2013.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Nugroho menjelaskan, bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian struktur birokrasi sebagai pelaksana penerapan kebijakan publik. Permasalahannya yaitu supaya tidak menimbulkan *bureaucratic fragmentation*, maka struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus terlaksana dengan baik (Nugroho, 2011).

Dalam penerapan penilaian autentik, peneliti membagi struktur birokrasi menjadi 2 (dua) bagian. Kedua hal tersebut adalah SOP dan Fragmentasi.

a. Standar Operating Procedure (SOP)

SOP dalam penilaian sudah ada seiring dengan diterapkannya Kurikulum 2013. Struktur birokrasi sudah terbentuk mulai di Tingkat Pusat sampai ke level yang paling rendah yaitu sekolah. Struktur birokrasi menjadi lembaga yang ditunjuk harus menjalankan tugas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam melaksanakan kebijakan. Adanya pemerataan kinerja dan beban kerja dari lembaga memudahkan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Sebagai acuan dalam menjalankan struktur birokrasi yaitu adanya SOP.

Kegiatan pelaksanaan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan nilai. Hal ini dibuktikan melalui SOP yang terdapat dalam buku panduan pelaksanaan penilaian Kurikulum 2013. Adanya buku panduan sudah barang tentu akan memberikan kemudahan bagi guru dalam melaksanakan penilaian saat kegiatan pembelajaran. SOP tersebut, mengacu pada Permendikbud No. 23/2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

b. Fragmentasi

Fragmentasi menurut Edward III dalam Winarno merupakan pembagian tanggung jawab bidang kebijakan yang ada di antara unit-unit organisasi. Tanggung jawab bidang kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi, tanggung jawab di sini yaitu menyampaikan sosialisasi, pelatihan dan pelayanan. Konsekuensi yang muncul dalam fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi di antara pemangku kebijakan yang diakibatkan dari unit-unit yang berbeda, sehingga mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain (Winarno, 2007).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan penilaian autentik di SMK Negeri 2 Karawang sudah dibagi sesuai dengan perannya masing-masing disertai koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait guna suksesnya pelaksanaan kebijakan.

B. Prosedur Efektivitas Implementasi Penilaian Autentik

Prosedur implementasi penilaian autentik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan hasil. Penelitian dilakukan sejak bulan Agustus sampai Oktober 2017 dengan

menghasilkan berbagai data melalui pengisian kuesioner angket, wawancara dan dokumentasi.

1. Perencanaan Penilaian Autentik

Berdasarkan analisis hasil wawancara yang didukung oleh data dan dokumen dapat ditegaskan bahwa guru PAI telah melakukan perencanaan penilaian sebelum pembelajaran berlangsung pada saat ajaran baru dimulai. Langkah awal dari proses penilaian yaitu membuat perencanaan mengenai model dan teknik penilaian yang digunakan meliputi rencana penilaian proses pembelajaran dan rencana penilaian hasil belajar peserta didik. Rencana penilaian proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar merupakan rancangan penilaian yang dilakukan guru untuk mengamati proses pembelajaran, perkembangan hasil belajar peserta didik dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan.

Kegiatan yang disiapkan saat perencanaan penilaian adalah menentukan tujuan penilaian, menentukan aspek-aspek penilaian mencakup penilaian sikap yaitu KI-1 (Sikap Spiritual) dan KI-2 (Sikap Sosial), penilaian pengetahuan terdapat pada KI-3, dan penilaian keterampilan terdapat pada KI-4, menganalisis setiap Kompetensi Dasar dan Indikator yang harus dikuasai peserta didik.

Sedangkan berdasarkan hasil kuesioner diperoleh hasil bahwa perencanaan penilaian autentik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukkan kategori sangat efektif yaitu sebesar 75%, dan sebesar 25% menunjukkan kategori efektif. Dengan kata lain, bahwa guru telah melaksanakan perencanaan penilaian autentik pada pembelajaran agama Islam dengan baik dan sangat efektif.

2. Pelaksanaan Penilaian Autentik

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, bahwa guru hanya mempersiapkan lembar penilaian dari sekolah untuk menilai seluruh kompetensi mulai dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, guru menginformasikan teknik penilaian kepada peserta didik. Penyampaian informasi dimaksudkan, agar peserta didik mengetahui model penilaian autentik, baik format atau rubrik penilaian yang digunakan, instrumen penilaian, skor nilai dan indikator penilaian.

Sedangkan berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh hasil pelaksanaan penilaian autentik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukkan kategori sangat efektif sebesar 25%, dan sebesar 75% adalah menunjukkan kategori efektif. Dengan kata lain, bahwa guru telah melaksanakan penilaian autentik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan baik dan efektif.

Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan penilaian pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 2 Karawang. Di bawah ini dideskripsikan penilaian autentik meliputi: 1) Instrumen penilaian sikap, 2) Instrumen penilaian pengetahuan dan 3) Instrumen penilaian keterampilan sebagai berikut:

a. Instrumen Penilaian Sikap

Penilaian sikap spiritual berorientasi pada KI-1 yaitu memahami, menghayati dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, sedangkan sikap sosial berorientasi pada KI-2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerja sama, toleran, damai, santun, responsif, simpati dan menampilkan perilaku yang mampu mengatasi berbagai masalah yang terjadi, mampu berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan mampu memosisikan dirinya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Penilaian yang digunakan meliputi penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal.

Berdasarkan hasil kuesioner dan didukung oleh data dapat ditegaskan bahwa instrumen penilaian sikap spiritual dan sikap sosial menunjukkan kategori sangat efektif sebesar 25% dan menunjukkan kategori efektif sebesar 75%. Dengan kata lain, bahwa guru PAI telah mengetahui dan memahami tentang tata cara penyusunan instrumen penilaian aspek sikap dengan menunjukkan kategori positif.

b. Instrumen Penilaian Aspek Pengetahuan

Teknik untuk mengukur kemampuan aspek pengetahuan dapat berupa tes lisan, tes tertulis atau penugasan.

Berdasarkan hasil kuesioner instrumen penilaian aspek pengetahuan yang didukung oleh data, maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan penilaian aspek pengetahuan menunjukkan kategori sangat efektif sebesar 25% dan menunjukkan kategori efektif sebesar 75%. Dengan demikian, bahwa guru PAI di SMK Negeri 2 Karawang mengetahui dan memahami tata cara penyusunan instrumen penilaian pada aspek pengetahuan dengan baik.

c. Instrumen Penilaian Aspek Keterampilan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan penilaian autentik pembelajaran pada aspek keterampilan sudah berjalan efektif. Teknik yang digunakan dalam penyusunan instrumen keterampilan melalui penilaian praktik, proyek dan portofolio.

Berdasarkan hasil kuesioner instrumen penilaian keterampilan, maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan instrumen penilaian keterampilan menunjukkan kategori sangat efektif sebesar 25% dan menunjukkan kategori efektif sebesar 75%. Dengan demikian, bahwa guru PAI di SMK Negeri 2 Karawang telah mengetahui dan memahami tata cara penyusunan instrumen penilaian pada aspek keterampilan dengan baik.

3. *Pengolahan dan Pelaporan Hasil Penilaian Autentik*

Hasil wawancara yang didukung oleh data, maka dapat ditegaskan bahwa pengolahan dan pelaporan hasil penilaian autentik yaitu menganalisis dan memberikan skor nilai untuk setiap penilaian sudah sesuai dengan panduan penilaian Kurikulum 2013. Selanjutnya, hasil dan skor dari penilaian diinformasikan kepada peserta didik. Bagi

peserta didik yang memperoleh nilai di bawah KKM dilakukan remedial. Kemudian, guru mengagendakan dan melaksanakan program remedial tersebut. Setelah mendapatkan nilai peserta didik untuk masing-masing aspek, para guru menyerahkan nilai kepada Wakasek bidang Kurikulum untuk kemudian dikonversikan dari puluhan menjadi range antara 1 - 4 dan diberi predikat.

Berdasarkan hasil kuesioner, maka dapat ditegaskan bahwa pengolahan dan pelaporan hasil penilaian autentik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukkan kategori sangat efektif sebesar 75%, dan menunjukkan kategori efektif sebesar 25%. Dengan kata lain, bahwa guru PAI telah melakukan pengolahan dan pelaporan sesuai buku panduan yang sudah ditetapkan.

C. Faktor Pendukung Efektivitas Implementasi Kebijakan Penilaian Autentik pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

1. Faktor Pendukung

Suksesnya tujuan pendidikan (*output*), sangat bergantung pada penerapannya (*proses*) dan dipengaruhi juga oleh sejauh mana kesiapan semua hal (*input*) yang dibutuhkan saat diterapkannya kebijakan. Berdasarkan penelitian di lapangan dapat diketahui dan dikemukakan tentang faktor pendukung implementasi kebijakan penilaian autentik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai berikut:

a. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah sebagai faktor pertama merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan penilaian autentik di sekolahnya, terutama dalam mengoordinasikan, menggerakkan dan menyelaraskan semua potensi yang tersedia. Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai faktor penentu yang dapat memobilisasi seluruh sumber daya di sekolah untuk terlaksananya visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah melalui program-program yang diselenggarakan secara terencana dan berkesinambungan.

b. Guru yang Kompeten

Guru yang bermutu termasuk penentu keberhasilan kualitas pendidikan. Termasuk dalam mengimplementasikan model penilaian autentik, agar terlaksana efektif sebagaimana yang diinginkan. Guru merupakan garda terdepan terhadap sukses dan berhasilnya mutu pendidikan maka sebaiknya guru menguasai berbagai kompetensi, yaitu profesional, pedagogis, kepribadian, sosial. Di samping hal itu, kompetensi guru tidak hanya sekedar menguasai sesuatu yang diajarkan, akan tetapi apa yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran semakin menyenangkan, menarik dan peserta didik merasa terdorong saat belajar dengan pribadi guru yang dapat memberi inspirasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kemampuan guru di sekolah di antaranya harus: (1) Menguasai materi ajar dan bahan ajar secara baik dan efektif, (2) Memahami karakter

peserta didik secara komprehensif, (3) Menguasai pengelolaan kegiatan pembelajaran secara baik, (4) Menguasai berbagai model, metode dan strategi pembelajaran secara inovatif, (5) Menguasai penilaian proses dan hasil belajar secara cermat, dan (6) Memiliki kepribadian dan wawasan pengembangan profesi.

c. **Aktivitas Peserta Didik**

Untuk memotivasi dan meningkatkan kreativitas peserta didik, guru hendaknya mampu meningkatkan kedisiplinan peserta didik, terutama disiplin diri (*self-discipline*). Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, diketahui peserta didik sudah menunjukkan keaktifannya dalam pembelajaran. Pada saat dilaksanakan penilaian di kelas, peserta didik telah ikut berpartisipasi dalam aktivitas penilaian, misalnya keterlibatan penilaian antar teman, penilaian diri, penilaian sikap dan penilaian keterampilan.

d. **Sosialisasi Implementasi Kebijakan Penilaian Autentik**

Sosialisasi kebijakan dalam menerapkan penilaian autentik perlu dilaksanakan, agar seluruh pihak yang terkait di lapangan memahami benar adanya perubahan yang nantinya akan dikerjakan oleh masing-masing sesuai tupoksi-nya, sehingga mereka akan mendukung adanya perubahan tersebut.

Sosialisasi bisa dilaksanakan melalui cara diklat dan bimbingan teknis di sekolah, diklat oleh Pemerintah atau kelompok mata pelajaran (MGMP). Pelatihan dan diklat semacam ini sangat penting, karena akan menunjang dan menentukan keberhasilan implementasi penilaian dalam pembelajaran, sehingga akan mampu meningkatkan mutu peserta didik dan sekolah.

Berdasarkan penelitian di lapangan, bahwa sosialisasi penerapan penilaian autentik telah dilaksanakan sebelum tahun ajaran baru, yaitu IHT kepada guru-guru yang dimulai pada bulan tanggal 12-13 Juli 2017 di sekolah.

e. **Fasilitas dan Sumber Belajar yang memadai**

Faktor pendukung berikutnya yang mendorong berhasil dan suksesnya implementasi penilaian autentik adalah tersedianya fasilitas dan sumber belajar yang cukup, sehingga penilaian yang telah disusun bisa diterapkan secara efektif. Fasilitas dan sarana belajar yang dapat diupayakan untuk mendorong terlaksananya penilaian autentik dengan efektif di antaranya tersedianya Laboratorium, Pusat Kajian, Perpustakaan, Tenaga Pengelola serta Panduan Guru dan siswa. Dengan demikian, di samping guru harus mengajar di kelas juga memiliki kemampuan untuk menyusun alat pembelajaran dan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sarana belajar yang nyata.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, keberadaan fasilitas telah ada seperti telah terpasangnya In Focus di masing-masing kelas, laboratorium praktik sudah ada, namun laboratorium Pendidikan Agama Islam yang masih terbatas.

f. Peran Pemerintah Daerah

Keberhasilan dalam menerapkan penilaian autentik yang diterapkan di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tergantung pada keikutsertaan Pemda. Pemda harus terus berusaha untuk menyediakan dan menciptakan SDM yang berkualitas dengan menyediakan anggaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mengadakan berbagai kegiatan misalnya diklat, *workshop* bagi guru sebagai pelaksana di lapangan, sehingga harapan meningkatkan kualitas secara keseluruhan bisa tercapai.

g. Peran Pengawas

Pengawas telah melakukan program bimbingan bagi guru di antaranya menyusun rencana pembelajaran, karena merencanakan kegiatan pembelajaran termasuk salah satu faktor yang harus disiapkan guru masing-masing. Pembinaan pengawas meliputi penyusunan rencana pembelajaran, pengembangan silabus, dan merancang RPP. Pembinaan pengawas lebih ditekankan pada penyusunan langkah-langkah kegiatan pembelajaran.

Pembinaan pengawas kepada guru dalam menerapkan penilaian autentik merupakan bagian dari komponen yang sangat penting. Sebagaimana pada komponen-komponen lainnya, pengawas berusaha memfasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal pelaksanaan penilaian, pengawas melakukan bimbingan teknis bagi guru tentang prosedur dan teknik penyusunan penilaian autentik. Sehingga, guru diharapkan mampu menyusun kisi-kisi soal sejalan dengan KI dan KD. Kemudian kisi-kisi tersebut dikembangkan menjadi butir-butir item soal yang akan diterapkan saat menilai kompetensi peserta didik terkait penilaian proses atau penilaian hasil belajar.

2. Faktor Penghambat Implementasi Penilaian Autentik

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya di sini adalah guru. Tenaga pendidik di SMK Negeri 2 Karawang terutama guru PAI secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih perlu ditingkatkan dalam hal pemahaman terhadap penguasaan materi, penguasaan metode dan media pembelajaran, dan menguasai pelaksanaan penilaian autentik. Perubahan pola pikir terkait dengan model pembelajaran saintifik juga perlu ditingkatkan, walaupun beberapa guru PAI di sekolah sudah banyak yang ikut berbagai diklat atau *workshop*.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan masih ada guru yang mengajar dengan menggunakan model pembelajaran klasik, belum termotivasi melakukan inovasi dalam hal pengembangan model pembelajaran sebagaimana esensi Kurikulum 2013 yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan cara mengamati, menanya, menggali, mengasosiasi dan menyimpulkan atau mempresentasikan. Dengan penggunaan model tersebut, maka keaktifan dan kesiapan belajar lebih berpusat pada peserta didik, bukan lagi mengajar itu, didominasi oleh guru dengan metode ceramahnya.

b. Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan sarana yang terbatas menjadi masalah saat menerapkan autentik, misalnya terbatasnya komputer dan In Focus, sarana praktik yang terbatas, lembar rubrik atau format penilaian yang kurang tersedia saat kegiatan belajar di kelas, buku panduan dan buku sumber yang masih terbatas, dapat menghambat dan kurang efektif saat menerapkan penilaian autentik di sekolah.

c. Instrumen Penilaian

Jumlah instrumen yang begitu banyak, sementara waktu kegiatan pembelajaran sangat terbatas menjadi penghambat saat menerapkan penilaian autentik secara efektif. Banyaknya instrumen penilaian di antaranya penilaian sikap yang meliputi: penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antar teman dan jurnal. Instrumen penilaian pengetahuan yang meliputi: penilaian lisan, tertulis, dan praktik. Instrumen penilaian keterampilan yang meliputi penilaian kinerja atau proyek. Instrumen saat melaksanakan penilaian tersebut, memerlukan format atau lembaran penilaian yang begitu banyak dalam setiap penilaiannya, sehingga banyak menghabiskan kertas dan dana.

d. Lingkungan Akademik

Hambatan berikutnya adalah lingkungan akademik yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi penilaian autentik. Lingkungan sekitar sekolah yang tidak nyaman, gaduh dan kondisi ruang kelas yang cukup panas, akan mengganggu kesiapan belajar peserta didik.

Kondisi sekolah yang dekat dengan aktivitas masyarakat, kaki lima yang ada di depan sekolah, adanya kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dan kegiatan-kegiatan lainnya sedikitnya berdampak terhadap fokus belajar peserta didik.

D. Dampak Efektivitas Implementasi Kebijakan Penilaian Autentik Terhadap Kinerja Guru PAI

Efektivitas implementasi kebijakan penilaian yang tercantum dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan akan berdampak terhadap profesionalisme kinerja guru PAI di sekolah, karena guru sebagai ujung tombak memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kemampuan peserta didik meliputi kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Adapun yang menjadi penilaian kinerja guru sesuai pembahasan penelitian ini fokus pada 3 (tiga) hal yaitu ; perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan pengolahan hasil pembelajaran.

1. Kesiapan Perencanaan Pembelajaran

Menurut Rahmat Raharjo bahwa kegiatan perencanaan pada kegiatan pembelajaran adalah sebagai upaya dalam menentukan berbagai aktivitas yang hendak dilaksanakan di ruang kelas, hubungannya dengan usaha meraih tujuan dari kegiatan pembelajaran yang

telah ditentukan dalam RPP. Dalam konteks pendidikan berbasis kompetensi, maka tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran tersebut adalah kemampuan yang hendak diperoleh peserta didik, sehingga rencana pembelajaran adalah sebagai upaya guna menentukan aktivitas yang hendak dilaksanakan, hubungannya dengan usaha mencapai kompetensi yang diharapkan, yakni kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Raharjo, 2010).

Berikut ini, hasil penelitian dan pembahasan kinerja guru tentang kesiapan perencanaan pembelajaran. Untuk melihat informasi terkait prosedur kinerja guru tersebut seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3. Kesiapan Perencanaan Pembelajaran

No.	Aspek Pengamatan	SKOR			
		1	2	3	4
1.	Menentukan SK dan KD				✓
2.	Merumuskan tujuan pembelajaran				✓
3.	Menentukan materi ajar				✓
4.	Menentukan kegiatan pembelajaran				✓
5.	Menentukan model dan alat pembelajaran			✓	
6.	Menggunakan strategi pembelajaran			✓	
7.	Menentukan sumber belajar			✓	
8.	Merencanakan evaluasi hasil akhir belajar			✓	
	Jumlah Total Skor	28			
	Jumlah Skor Maksimum	32			
	Nilai % (Persen) dan klasifikasi	87,5 (Baik Sekali)			

Berdasarkan hasil penghitungan tentang kesiapan perencanaan pembelajaran menunjukkan perolehan rata-rata nilai sebesar 87,5% menunjukkan kategori Sangat Baik. Sedangkan hasil wawancara dengan guru, bahwa guru PAI SMK N 2 Karawang telah merencanakan persiapan mengenai rencana pembelajaran yang didokumentasikan melalui administrasi guru. Hal tersebut sudah dilakukan di awal tahun pelajaran dan akan dilaksanakan perbaikan atau penyesuaian sebelum proses pembelajaran. Secara umum guru-guru PAI SMK N 2 Karawang sudah memenuhi kriteria kinerja dalam merencanakan pembelajaran.

2. Kesiapan Pelaksanaan Pembelajaran

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan proses pembelajaran mengacu kepada kegiatan perencanaan pembelajaran yang sudah dirancang. Penyampaian materi ajar diselaraskan dengan tahapan program secara teratur pada langkah persiapan.

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran mencakup ; Kegiatan Pendahuluan, Kegiatan Inti dan Kegiatan Penutup. Kegiatan Pendahuluan adalah suatu proses awal tatap muka guru dengan peserta didik. Pada kegiatan Inti, di mana guru menyampaikan teknis, pengarahan, apersepsi, motivasi dan menginformasikan target yang hendak

diperoleh dengan mengadakan dan melemparkan pertanyaan (*pre test*). Selanjutnya, guru menyampaikan materi yang akan disampaikan melalui berbagai strategi, model pembelajaran, metode dan teknik yang sudah ditentukan. Sedangkan pada Kegiatan Penutup, di mana guru melakukan *refleksi, feed back*, dan penilaian (*pos test*).

Untuk mendapatkan keterangan tentang kesiapan pelaksanaan pembelajaran, bisa diamati melalui format penilaian seperti tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4. Kesiapan Pelaksanaan Pembelajaran

No.	Aspek Pengamatan	Nilai	Keterangan
1.	Kegiatan pendahuluan		
	Apersepsi dan Motivasi	65	Baik
	Menyampaikan inti kompetensi dan rancangan kegiatan pembelajaran	75	Baik
2.	Kegiatan Inti		Baik
	Menguasai materi pembelajaran	75	Baik
	Menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik	72,22	Baik
	Menerapkan model pembelajaran <i>scientific</i>		
	Memanfaatkan sumber belajar ketika pembelajaran berlangsung	65	Baik
	Melaksanakan penilaian sesuai kompetensi peserta didik	65	Baik
	Melibatkan peserta didik ketika belajar	66,67	Baik
	Menggunakan bahasa yang baik dan benar	70	Baik
		87,5	Baik Sekali
3.	Kegiatan Penutup		
	Mengadakan Refleksi, Penilaian dan Remedial	75	Baik
	Hasil Rata-rata	71,64%	Baik

Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, bahwa kesiapan pelaksanaan pembelajaran menunjukkan hasil rata-rata nilai sebesar 71,64% menunjukkan kategori baik. Namun, masih ada beberapa bagian yang harus menjadi perhatian dan harus terus ditingkatkan, agar guru punya kapasitas melaksanakan pembelajaran agar lebih baik lagi.

3. Kesiapan Pengolahan Hasil Pembelajaran

Salah satu kewajiban profesi guru adalah melakukan penilaian terhadap setiap kegiatan yang diselenggarakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Karena kegiatan ini, diharapkan dapat mencerminkan perkembangan dan kemajuan belajar peserta didik dari waktu ke waktu, untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan pada saat proses pembelajaran dan akhir pembelajaran.

Selanjutnya, dalam tahap ini seorang guru agar memiliki kemampuan untuk menentukan strategi dan cara-cara penilaian, memiliki keterampilan menyusun instrumen penilaian, mampu mengolah hasil penilaian. Untuk mendapatkan gambaran kesiapan pengolahan hasil pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Kesiapan Pengolahan Hasil Pembelajaran

No.	Aspek Pengamatan	SKOR			
		1	2	3	4
1.	Guru merancang instrumen penilaian untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik		✓		
2.	Guru menggunakan berbagai format penilaian untuk mengukur kompetensi hasil belajar peserta didik pada aspek sikap		✓		
3.	Guru menggunakan bentuk penilaian untuk mengukur kemampuan hasil belajar peserta didik pada aspek pengetahuan			✓	
4.	Guru menggunakan pedoman penilaian untuk mengukur kompetensi hasil belajar peserta didik pada aspek keterampilan			✓	
5.	Guru menggunakan hasil penilaian sebagai umpan balik untuk peserta didik mengani kemajuan belajarnya			✓	
6.	Guru mengolah hasil penilaian sebagai laporan kemajuan prestasi peserta didik				✓
	Jumlah Total Skor	17			
	Jumlah Skor Maksimum	24			
	Nilai % (Persen) dan Klasifikasi	17/24 x 100 = 70,83% Baik			

Berdasarkan hasil penghitungan tentang kesiapan pengolahan hasil belajar peserta didik menunjukkan rata-rata sebesar 70,83 termasuk kategori Baik. Namun masih ada kekurangan dalam hal merancang instrumen penilaian dan penggunaan format penilaian. Guru merasa kesulitan saat merancang soal penilaian sikap dan kesulitan dalam menerapkan penilaian sikap terhadap individu peserta didik, karena terbatasnya waktu belajar antara mengajar dengan mengamati sikap peserta didik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas implementasi kebijakan penilaian autentik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam disosialisasikan melalui faktor komunikasi meliputi transformasi, kejelasan dan konsisten dilaksanakan dengan cara kegiatan bimtek, *workshop*, IHT dan pendampingan bagi guru, baik yang diselenggarakan sekolah, LPMP dan Kemenag, didukung oleh sumber daya yang memadai, dengan menunjukkan sikap dan komitmen yang bertanggungjawab, berdasarkan *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman dalam menerapkan implementasi kebijakan dengan melakukan koordinasi antar pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, Kemenag, LPMP, Pengawas dan sekolah.

2. Prosedur implementasi kebijakan penilaian autentik pada pembelajaran PAI meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengolahan dan pelaporan hasil penilaian belajar peserta didik.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penilaian autentik yaitu kepala sekolah, guru yang berkompeten, aktivitas peserta didik, sosialisasi kebijakan implementasi penilaian autentik, fasilitas dan sumber ajar yang memadai, peran pemerintah daerah, peran pengawas. sedangkan faktor penghambat terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, instrumen penilaian dan lingkungan akademik.
4. Implementasi kebijakan penilaian autentik berdampak terhadap penilaian selama ini yang fokus pada penilaian pengetahuan peserta didik semata, sementara aspek lainnya kurang diperhatikan. Implementasi kebijakan penilaian autentik memberikan warna yang berbeda, di mana guru harus menilai kompetensi peserta didik selama pembelajaran berlangsung meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berdampak juga terhadap kesiapan, kinerja dan kompetensi guru dalam mengelola teknik dan model penilaian yang harus mengacu pada standar isi, standar proses dan standar kelulusan.

Kesimpulan tersebut di atas, berimplikasi pada berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Adanya kebijakan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, berimplikasi kepada: 1) para instruktur atau implementor. yaitu harus mampu melaksanakan tugas dengan cermat, objektif, sabar dan tekun serta hati-hati dan tanggung jawab, 2) Kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk terlaksananya kebijakan yang diinstruksikan pemerintah, 3) Guru harus menjalankan kebijakan yang sudah diinstruksikan pemerintah.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin (2009) *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulyasa, E. and Mukhlis (2007) *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003) *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2011) *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elekmedia Komputindo.
- Raharjo, R. (2010) *Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Magnum Pustaka.
- Sukmadinata, N. S. (2005) *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Winarno, B. (2007) *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Yamin, M. (2007) *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*. Jakarta: Gaung Persada Press.